

Abstrak

Wilayah pesisir adalah sebuah wilayah yang dinamik dengan pengaruh daratan terhadap lautan atau sebaliknya. Proses keterkaitan (*interlinkages*) antara wilayah darat dan laut ini merupakan sumber dinamika yang penuh tantangan dalam kerangka pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu. Fokus dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan. Dalam Penelitian ini mengkaji beberapa indikator yaitu Sumberdaya, Komunikasi, Struktur birokrasi dan Disposisi. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan informan sebanyak 13 orang yang akan diwawancarai diantaranya adalah Dinal Lingkungan Hidup sebanyak 2 orang, Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 1 orang, Dinas Pariwisata Sebanyak 1 orang, WALHI sebanyak 1 orang, KPA sebanyak 1 orang, ASP sebanyak 1 orang, LBHM sebanyak 1 orang, pihak swasta sebanyak 1 orang dan masyarakat sebanyak 4 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, perivikasi dan penegasan kesimpulan. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah Kota Makassar belum sepenuhnya maksimal dalam melaksanakan berbagai kegiatan edukasi, pelatihan, hingga koordinasi ke berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan implentasi kebijakan perlindungan wilayah pesisir di Kota Makassar dalam aspek kesiapan. Pada asapek komunikasi Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam hal ini SKPD yang terlibat menyepakati bahwa komunikasi mengenai kebijakan perlindungan pesisir sudah sangat efektif. Pada aspek struktu birokrasi Pemerintah Daerah Kota Makassar atau SKPD yang terlibat sudah melakukan beberapa pengontrolan dan edukasi terkait implementasi kebijakan yang sedang berjalan, dilapangan dapat disimpulkan bahwa aparatur pemerintah telah memiliki struktur birokrasi yang dibagi kedalam beberapa devisi atau kelompok kerja, yang saling bersinergi dalam mendukung program perlindungan kawasan pesisir.

Kata Kunci : implementasi kebijakan, kawasan lindung, wilayah pesisir

Abstract

The coastal area is a dynamic area with the influence of the land on the sea or vice versa. The process of interlinkages between land and sea areas is a source of dynamics which is full of challenges within the framework of integrated management of coastal and marine areas. The focus in this research is policy implementation. The type of research used is a qualitative method with 13 informants to be interviewed including 2 people from the Environment Agency, 1 person from the Maritime Affairs and Fisheries Service, 1 person from the Tourism Office, 1 person from WALHI, 1 person from KPA, 1 ASP. people, 1 person from LBHM, 1 private party and 4 people from the community. Data collection techniques used are observation, interviews, documentation methods. Data analysis techniques used in this study were data collection, data reduction, data presentation, validation and confirmation of conclusions. Researchers can conclude that the government of Makassar City has not fully implemented various educational, training and coordination activities with various parties involved in the implementation of coastal area protection policies in Makassar City in terms of readiness. In the communication aspect of the Regional Government of Makassar City, in this case the SKPD involved agree that communication regarding coastal protection policies has been very effective. In the aspect of the bureaucratic structure of the Makassar City Regional Government or SKPD involved, they have carried out some control and education related to the implementation of ongoing policies. In the field, it can be concluded that the government apparatus already has a bureaucratic structure that is divided into several divisions or working groups, which synergize with each other in supporting the program. coastal area protection.

Keywords: policy implementation, protected areas, coastal areas